

DINAMIKA CORAK BERPOLITIK ELITE NU :

Tarik-Menarik yang Tak Kunjung Usai

Nahdlatul Ulama (NU) adalah hal yang “eksotik” bagi para pengamat politik dalam dan luar negeri. Ketertarikan mereka untuk mempelajari berbagai dimensi dalam kehidupan kaum Nahdliyin tak pernah luntur. NU senantiasa ditempatkan sebagai sebuah komunitas dengan kultur, perilaku, karakter dan peran sosial-politik yang sangat khas dalam sejarah Indonesia sehingga senantiasa menarik untuk diperbincangkan.

Dalam konteks politik, selama ini telah berkembang pandangan yang miring tentang politisi NU. Secara “stereotipis” politisi NU kerap diidentikkan dengan corak berpolitik yang pragmatis, akomodasionis dan kompromistis. Para pengamat politik sering mencitrakan politisi NU sebagai kelompok tradisionalis yang konservatif, gagap dalam menghadapi pertarungan politik dan senantiasa mencari kesempatan untuk menjadi patron terdekat dari pemegang kekuasaan.

Tulisan ini ingin melihat apakah pandangan-pandangan itu cukup obyektif dalam menggambarkan perilaku politik elit NU. Ataukah pandangan-pandangan itu hanya menggambarkan perilaku politik NU dalam suatu fase dari sebuah sejarah yang

panjang, atau menggambarkan perilaku politik kubu tertentu dalam NU. Dengan kata lain, bisa jadi pandangan-pandangan yang stereotipis cenderung menafikan terjadinya dinamika yang semarak dan penuh warna dalam suatu kelompok dari masa ke masa.

1. Demokrasi Liberal (1950-1959) : Mengembangkan Patronase Politik

Dalam pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk Desember 1949, NU dihadapkan pada problem klasik mereka. NU tidak mempunyai kader berkualitas yang cukup untuk menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, selain jabatan menteri agama. Problem ini menyebabkan NU tidak berhasil mengembangkan sayap politik yang kuat dalam tubuh Masyumi maupun dalam parlemen. Kekuatan NU masih bertumpu pada sejumlah kecil ulama dan kiai yang kharismatik. Dan seperti dikatakan Herbert Feith (1962), para pemimpin NU adalah tipe “penggalang massa”, bukan administrator yang baik. Hal inilah yang menyebabkan NU tidak dapat mengambil keuntungan dari peranan dominannya selama era revolusi fisik.¹

¹ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, LKIS, 1994, hal. 63.

Di era demokrasi liberal, NU dihadapkan pada konflik dengan kalangan Islam modernis untuk memperebutkan kepengurusan Masyumi dan jabatan Menteri Agama. Kerukunan antara Islam tradisional dengan Islam modernis yang terjalin di era revolusi fisik semakin luntur ketika Masyumi didominasi oleh unsur Persis, Mohammad Natsir, tahun 1949. Dari 14 anggota badan eksekutif pusat Masyumi, hanya 2 orang yang berasal dari NU. NU kemudian mengusulkan Masyumi berubah menjadi badan federasi, namun usulan ini tidak diindahkan kalangan modernis Masyumi.

Hubungan NU dengan Islam modernis semakin renggang manakala Perdana Menteri Wilopo memberikan jabatan Menteri Agama kepada tokoh Muhammadiyah, Fakih Usman, April 1952. Fakih menggantikan Wahid Hasyim yang mengundurkan diri setelah mendapatkan banyak kritik dari Islam modernis dan tidak mau menjadi sebagai sumber konflik di Masyumi. Pengangkatan Fakih sebagai menteri agama ini dan protes-protes terhadap Wahid Hasyim benar-benar dianggap sebagai penghinaan oleh kalangan NU.²

NU kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi

partai politik mandiri berdasarkan keputusan Mukhtar di Palembang tahun yang sama. Menurut Martin, alasan pemisahan diri ini adalah kesenjangan antara kontribusi yang sangat besar dalam perjuangan revolusi fisik dan bobot suara yang diperoleh NU di dalam Masyumi, serta masalah jabatan menteri agama tadi.³

Pada periode kabinet Ali Sastroamidjojo, politisi NU menunjukkan sikap yang luwes dan kompromistis dengan berpartisipasi dalam pemerintahan yang terlalu kiri menurut kalangan Islam modernis Masyumi. Berkat sikapnya itu, NU mendapatkan jabatan Menteri Agama, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertanian.

Pada tahun 1954, Menteri Agama dari NU, Kiai Masykur, memberikan gelar *Wali al-Amr al-Dlaruri bi al-Syaukah* kepada Soekarno dan pemerintah. Gelar ini meneguhkan status sah Soekarno sebagai Kepala Negara sehingga harus dipatuhi oleh semua umat⁴. Bagi Masyumi, gelar ini mempersulit perjuangan Islam untuk mewujudkan negara Indonesia yang berlandaskan Islam, yang akan mereka perjuangkan di Majelis Konstituante. Para pengamat yang tidak simpati kepada NU juga melihat hal ini sebagai bukti betapa oportunistis dan menjilatnya kalangan tradi-

2 Andree Feillard, *NU vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, LKIS, 1999, hal. 45

3 Bruinessen, *op. cit.*, hal 66 ; Keputusan NU untuk masuk ke dunia politik menurut Andree Feillard merupakan keberanian yang luar biasa karena NU tidak mempunyai kader-kader yang memadai. Yang dilakukan NU kemudian adalah merekrut kader-kader politik dari luar: pengusaha, praktisi hukum, para ahli ekonomi, tanpa terlalu mempermasalahkan hubungan mereka dengan NU. Cara-cara ini memang membuat sayap NU semakin kuat, namun hal ini pula yang pada perkembangannya membuat otoritas kiai terancam di kemudian hari. Feillard, *op. cit.*, hal. 46.

4 Feillard. *Ibid.*, hal. 47

sionalis kepada Soekarno.⁵

Namun Rais Am NU, Kiai Wahab Chasbullah membenarkan gelar itu dengan dasar fikih bahwa wanita Islam yang tidak mempunyai wali nasab, disyaratkan untuk menikah di depan wali hakim. Oleh karena itu, perlu ditetapkan bahwa yang harus menjadi wali hakim pada masa itu adalah Kepala Negara.⁶

Menurut Wahab, apabila rakyat tidak mau mengakui keabsahan pemerintahan Soekarno secara agama, akan muncul bermacam-macam *waliy al-Amri*. Wahab mengakui keberadaan presiden Soekarno karena yang bersangkutan bersembahyang, menikah secara Islam dan bersumpah berdasarkan Islam. Kiai Wahab menjelaskan bahwa Soekarno dapat dianggap sebagai Imam Dlaruri, karena Imam A'dhom yang sempurna, yang dapat menguasai seluruh dunia Islam dan yang semartabat dengan mudjtahid mutlak sudah tidak ada semenjak 700 tahun yang lalu.⁷

Sementara itu menurut Bruinessen, gelar itu merupakan upaya untuk memperkuat posisi pengadilan syariah yang baru didirikan di Sumatra Barat untuk menggantikan pengaruh adat setempat yang sudah mapan dalam hal penunjukkan wali hakim. Legitimasi pengadilan syariah ini tergantung pada pemerintah. Dengan

menyatakan bahwa pemerintah sebagai waliy al-amr al-dlaruri bi al-syaukah, ulama NU menegaskan pengadilan syariah-lah pihak yang berwenang menunjuk wali hakim. Jadi gelar itu merupakan respon atas problem lokal. Namun harus diakui bahwa ulama NU tidak memikirkan implikasi selanjutnya, di mana Soekarno memanfaatkan gelar itu untuk memperkuat kedudukannya.⁸

Desember 1956, panglima militer di tiga propinsi di Sumatra mendirikan "Dewan Banteng", "Dewan Gadjah" dan "Dewan Garuda". Hal ini menggoyahkan kedudukan Kabinet Ali Sastroamidjojo, apalagi ketika Masyumi mengundurkan diri dari kabinet Januari 1957. Masyumi bahkan bersimpati pada dewan-dewan militer itu dan menuntut kabinet Ali diganti dengan kabinet non-parlemen yang dipimpin Hatta. NU pada perkembangannya bersedia menerima usulan kabinet non-parlemen yang diusulkan Masyumi dan PSI. Meskipun usulan ini akhirnya ditolak oleh Soekarno, setidak-tidaknya terlihat bahwa NU berani berbeda pendapat dengan Soekarno.

Keberanian itu juga terlihat dari sikap NU terhadap konsep Demokrasi Terpimpin yang diperkenalkan Soekarno Februari 1957. PKI, PNI dan Murba menyetujui pembentukan golongan fungsional sebagai

5 Syafi'i Maarif (1988 : 110-113) seperti dikutip dalam Bruinessen, *op. cit.*, hal. 72.

6 Feillard, *op. cit.*, hal. 48.

7 Menurut Ali Haidar, hal ini sesuai dengan toleransi NU terhadap keragaman tingkat keimanan mengikuti teologi Imam Asy'ari; Lihat M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama Dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fikih dalam Politik*, Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 156.

8 Bruinessen, *op. cit.*, hal. 74.

bagian dari Demokrasi Terpimpin. Masyumi dan Partai Katolik Indonesia menolak keras, sedangkan NU, PSI dan beberapa partai lain menolak secara kurang tegas.⁹ NU pada awalnya juga menolak pembentukan Kabinet Gotong Royong yang melibatkan PKI dan mengkhawatirkan persekutuan yang semakin erat antara Soekarno dan PKI. Tentang hal ini, Kiai Wahab Chasbullah berkata:

"Bung Karno kelewat gandrung persatuan, hingga termakan oleh ambisinya mempersatukan partai-partai yang sejak semula mempunyai unsur-unsur yang berbeda, yang mustahil bisa dipersatukan."¹⁰

Namun pada akhir Juni 1957, sidang partai NU memutuskan keikutsertaan NU dalam kabinet Ir Djuanda Kartawidjaja bentukan Soekarno berdasarkan kaidah fikih *dar' al- mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*. NU berdalih, keputusannya itu untuk mencegah datangnya madlarat yang lebih besar, sebab jika posisi NU di pemerintahan tidak digunakan, niscaya akan diduduki oleh kalangan Nasrani sehingga semakin merugikan kepentingan Islam. NU juga menyadari bahwa dirinya belum siap benar untuk menjadi kekuatan oposisi sehingga tidak memaksakan diri.¹¹

Hal lain yang dapat mencerminkan

sikap politik NU adalah perdebatan tentang dasar negara. Sebagaimana halnya Masyumi, NU juga bereaksi keras ketika pada awal 1953, Soekarno mengatakan bahwa gagasan negara Islam akan menghadapkan Indonesia pada ancaman separatisme dari kalangan kelompok etnik non-Muslim. NU secara khusus berkeberatan dengan asumsi Soekarno bahwa pemerintahan Islam tidak akan mampu memelihara persatuan nasional.¹²

Dalam perdebatan yang terjadi di Majelis Konstituante tahun 1956 hingga 1958, para pendukung negara sekuler dan pengikut Islam politik belum menemukan kesepakatan tentang bentuk negara. Dalam kampanyenya, elit NU menyatakan diri sebagai penganjur negara nasional yang berdasarkan Islam. Kerja sama antara Islam dan nasionalis, menurut NU adalah inti persatuan. Dalam pandangan NU, yang harus dipegang orang Islam hanyalah jabatan Kepala Negara dan Menteri Agama. Sedangkan yang lain, termasuk Ketua Parlemen dan Kepala Daerah dapat dipegang oleh unsur non-Islam.¹³

Dalam perdebatan tentang dasar negara (Islam vs Pancasila) di parlemen tahun 1959, NU juga berada di kubu Masyumi untuk berhadap-hadapan dengan kubu Soekarno, PNI dan PKI. Dua orang

9 M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, The Macmillan Press Ltd, 1981, hal. 243.

10 Saifudin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, Gunung Agung, 1987, hal. 445.

11 Feillard, *Ibid*, hal. 52.

12 Herbert Feith (1962: 283) dan H. Endang Saiffudin Anshari (1981:61-2), seperti dikutip dalam Bruinessen, *op. cit.*, hal. 71.

13 Zuhri, *op. cit.*, hal. 521.

pemimpin NU yang pada saat-saat itu sangat kritis terhadap gagasan-gagasan Soekarno adalah KH. M. Dahlan dan Imron Rosjadi.¹⁴

Sikap politik NU juga terlihat dari perdebatan tentang bentuk konstitusional dari Demokrasi Terpimpin. Tahun 1958, Kastaf AD, Jenderal Nasution mengusulkan agar Indonesia kembali ke UUD 1945. Meskipun sebelumnya NU turut memperjuangkan agar Islam — bukannya Pancasila — dijadikan dasar negara, NU pada akhirnya mengikuti jejak PNI dan PKI untuk menerima ide Nasution itu. Namun NU mengajukan syarat Piagam Jakarta harus diakui sebagai bagian dari UUD 1945.¹⁵

Ketika Konstituante memilih untuk tidak mengakui Piagam Jakarta, NU berbalik menolak UUD 1945. Persoalan ini kemudian dipecahkan melalui pemungutan suara di Majelis Konstituante, namun tetap tidak menghasilkan suara mayoritas. Setelah melalui pendekatan antara pihak militer dan PBNU awal Juli 1959, Ketua NU Idham Chalid dan Sekretaris PBNU Saifuddin Zuhri menyetujui Dekrit Presiden namun tetap menuntut agar Piagam Jakarta diakui menjiwai UUD 1945. Pada 5 Juli, Soekarno membubarkan Majelis Konstituante dan mendekritkan berlakunya UUD 1945 dengan menyatakan, “Kami berkeyakinan

bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”.¹⁶

2. Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) : Di Bawah Kharisma Soekarno

Demokrasi Terpimpin yang dimulai 1959 diwarnai dengan peralihan kekuasaan dari parlemen hasil pemilu yang demokratis ke tangan eksekutif, marginalisasi Masyumi akibat keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI, serta meluasnya pengaruh PKI dan kelompok sayap kiri dalam pemerintahan.¹⁷ Berkaitan dengan terbentuknya Demokrasi Terpimpin, timbul perpecahan dalam tubuh NU. Rais Aam NU, Kiai Wahab Chasbullah, sebagai pengagum Soekarno dengan setia mendukung Demokrasi Terpimpin. Elit NU lain seperti Masjkur, Idham Chalid, Zainul Arifin, Saifuddin Zuhri dan Ahmad Sjaichu juga dengan segera menyesuaikan diri dengan Demokrasi Terpimpin. Di sisi lain, elit NU yang minoritas secara tegas menolak seluruh gagasan Demokrasi Terpimpin. Yang paling vokal di antara mereka adalah Wakil Ketua Tanfidziyah NU KH. M. Dachlan dan Ketua Ansor Imron Rosjadi, serta dua kiai yang kelak menjadi Rois Aam NU, Kiai Bisri Syansuri dan Kiai Ahmad Siddiq.¹⁸

14 Lihat catatan kaki no. 25 dalam Bruinessen, *loc. cit.*

15 Feillard, *op. cit.*, hal. 57-58

16 Daniel S. Lev (1966: 277) seperti dikutip dalam Feillard, *Ibid.* hal. 59.

17 Greg Fealy, “Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU,” dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), dalam *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, LKIS, 1997, hal.27.

18 Bruinessen, *op. cit.*, hal. 47.

Maret 1960, Soekarno membubarkan parlemen hasil pemilu 1955 dan menggantikannya dengan DPR Gotong Royong (DPRGR), yang disusun lebih menurut selera dan naluri politiknya sendiri. Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang menjadi penentang Soekarno paling konsisten, tidak lagi terwakili di dalam parlemen, dan hampir seluruh kursi diperuntukkan bagi kalangan "kelompok fungsional", termasuk delegasi militer.¹⁹

NU mengalami perpecahan pendapat mengenai keabsahan keikutsertaannya dalam DPRGR. Di satu pihak, ulama garis keras seperti KH. Bisri Syansuri dan Ahcmad Siddiq menyatakan keikutsertaan NU dalam DPRGR sama saja dengan memaafkan ghasab, suatu istilah hukum yang artinya merampas hak atau milik orang lain. Menurut mereka, Soekarno telah melanggar hak para pemilih dalam pemilu dengan membubarkan parlemen dan secara sewenang-wenang mengganti anggota legislatif yang dipilih rakyat dengan orang-orang pilihannya sendiri.²⁰ Kiai Siddiq menganggap DPR ini anti demokrasi dan keikutsertaan NU dalam DPR yang tidak seluruhnya dipilih oleh rakyat bertentangan dengan fikih.²¹

Di pihak lain, Kiai Wahab Chasbullah menjelaskan bahwa NU tidak punya pilihan

lain, karena jika tidak menerima DPRGR, ada kemudian NU sebagai parpol dilarang serta dikeluarkannya NU dari pemerintahan. NU harus ikut dalam DPR ini untuk membetulkan kesalahan-kesalahan pemerintah yang akan dibentuk menurut prinsip yang dilandaskan pada al-Qur'an: amar ma'ruf nahi munkar. Juga kaidah fikih *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, memberikan prioritas untuk menghindarkan bahaya, yaitu bahaya vakum jika DPR dibubarkan. Memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Juga kaidah *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*, kewajiban tidak boleh ditinggalkan dengan alasan tidak bisa dilakukan secara penuh.²²

Wahab berkeyakinan bahwa umat Islam masih belum siap melakukan politik konfrontasi menghadapi penguasa. Menurutnya, oposisi bukan hanya tindakan sia-sia tapi juga mengundang bahaya besar bagi NU dan para pengikutnya. Wahab berpendapat jauh lebih baik jika NU tetap di dalam pemerintahan, karena dengan cara ini NU dapat mempertahankan pengaruh terhadap Soekarno dan dapat menandingi aktivitas PKI.²³

Sebagai bentuk protesnya terhadap Demokrasi Terpimpin, KH. Dachlan dan Imron Rosjadi bergabung dalam Liga Demokrasi bersama beberapa anggota

19 Dalam DPRGR, NU mendapatkan 36 kursi, PSII (8), Perti (2), PKI (30), TNI (34), dan kelompok fungsional (79); Lihat Bruinessen, *op. cit.*, hal. 74.

20 Fealy, *op. cit.*, hal. 29-30.

21 Masyhuri (1983:58) seperti dikutip dalam Feillard, *op. cit.*, hal. 60-61.

22 Haidar (1991:223) seperti dikutip dalam Feillard, *Ibid.*, hal. 60.

23 Fealy, *op. cit.*, hal. 28.

Masyumi, PSI, serta beberapa unsur non-partai.²⁴ Namun mayoritas politisi NU tidak menentang campur tangan Soekarno terhadap parlemen dan menerima begitu saja kursi mereka di DPRGR. Tokoh NU, Zainul Arifin bahkan dipilih sebagai ketua DPRGR. Para pemimpin NU masih menunjukkan kesetiannya terhadap Soekarno. Ketua Tanfidziyah NU, KH. Idham Khalid secara blak-blakan membela manifesto ideologi nasionalistik populis Soekarno, Manipol Usdek. Pembela Manipol Usdek yang lebih bersemangat adalah Wahib Wahab, putra Menteri Agama Wahab Chasbullah. Wahib memuji Manipol sebagai hasil ijtihad Soekarno, yang berarti juga mengakui Manipol sebagai derivasi logis dari sumber-sumber hukum Islam.²⁵ Idham mendapat ganjaran dengan jabatan tinggi sebagai wakil ketua DPA. Bahkan pada 1964, Idham dan Saifuddin Zuhri mendirikan Yayasan Api Islam yang menurut Bruinessen fungsinya kurang-lebih adalah mempropagandakan gagasan-gagasan politik Soekarno di kalangan Muslim Tradisional.²⁶

Meskipun tidak banyak berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan aktual pemerintah, NU memegang beberapa pos menteri sepanjang periode Demokrasi

Terpimpin. Posisi ini memudahkan NU membangun sistem patronase yang sangat bermakna bagi para pendukungnya di berbagai daerah.²⁷ Akan tetapi, NU tetap diliputi kekhawatiran akan hubungan yang semakin erat antara Soekarno dan PKI. Gagasan Nasakom yang memberikan legalitas bagi kedudukan PKI dalam parlemen dan pemerintahan adalah usaha Soekarno untuk mengimbangi menguatnya pengaruh Angkatan Darat di pemerintahan. Dihadapkan pada musuh yang sama -PKI— NU semakin dekat dengan Angkatan Darat. Angkatan Darat dan NU secara terang-terangan menghadapi gerakan-gerakan pengorganisasian massa yang dilakukan PKI.

NU menandingi organisasi-organisasi underbow PKI dengan membentuk PMII, Banser, Lesbumi, HPMI, dan secara aktif menentang keikutsertaan PKI dalam pemerintahan. Meskipun Rais Aam NU, KH. Wahab Chasbullah menunjukkan sikap yang sangat hati-hati terhadap PKI dan tetap menjadi pendukung setia Soekarno, beberapa tokoh muda seperti Subchan Z.E., Yusuf Hasyim, Zamroni, Munasir dan Chalid Mawardi mengambil inisiatif-inisiatif yang keras untuk mewujudkan gerakan anti-komunis sebelum dan

24 Imron Rosjadi dan beberapa unsur PSI ingin Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan dan membubarkan PKI. Karena sikapnya ini, Rosjadi kemudian dipenjarakan oleh pemerintah Soekarno. Lihat catatan kaki no. 88 dalam Feillard, *op.cit.*, hal. 62.

25 Deliar Noer (1987:406) dikutip dalam Bruinessen, *op. cit.*, hal. 75.

26 Bruinessen, *Ibid.*

27 *Ibid.*, hal. 76.

sesudah Oktober 1965.

3. Era Orde Baru (1966-1984) : Radikalisme Islam Tradisionalis

Berbagai pengamat mengakui pemimpin baru NU di awal Orde Baru yang paling mengesankan adalah Subchan ZE. Subchan adalah aset besar NU berkat peran-perannya sebagai perantara sosial dan budaya. Subchan mengambil peranan penting dalam mengorganisir serangkaian demonstrasi anti-komunis yang mengantarkan kelahiran Orde Baru.²⁸ Subchan juga turut berperan dalam sidang-sidang MPRS yang mengantarkan Soeharto sebagai presiden menggantikan Soekarno.

Namun tak lama kemudian Subchan berubah menjadi pengkritik yang paling keras terhadap pemerintah dan kekuatan sospol yang menurutnya menyimpang dari garis Orde Baru. Dalam pidato di radio tahun 1968, sebagai wakil MPRS Subchan melontarkan kritik terhadap pemerintah dan menuduh komponen-komponen Orde Baru telah meninggalkan kaidah-kaidah Orde Baru. Dalam pandangan

Subchan kalangan parpol dan kaum teknokrat sama-sama tidak berorientasi pada pembangunan dan hanya sibuk mengurus ideologi.²⁹

Subchan juga gigih mempertahankan eksistensi MPRS. Ketika beberapa tokoh NU mendukung ide pemerintah untuk merombak keanggotaan DPRGR dan MPRS, Subchan dengan gigih menentangnya. Ide ini menurut Subchan dalam jangka panjang akan merugikan kalangan parpol. Kegigihan Subchan dalam membela kepentingan parpol juga terlihat dari penolakannya terhadap keputusan Mendagri Amir Machmud mengeluarkan Permen 12/1969. Permen ini mengatur pemurnian anggota parlemen yang ternyata hanya menguntungkan Golkar.³⁰

Pemilu tahun 1971 adalah puncak dari kritisisme Subchan terhadap pemerintah. Dalam kampanye pemilu, Subchan secara terbuka berkonfrontasi dengan Golkar dan melontarkan kritik pribadi terhadap lawan politiknya, terutama Ali Murtopo dan Amir Machmud. Pada pemilu ini, Subchan benar-benar menjadi model perlawanan terhadap

28 Tentang peranan Subchan di awal Orde Baru lihat Bruinessen, *op.cit.*, dan Feillard, *Ibid.*, hal. 162-170.

29 Arief Mudatsir, "Subchan ZE dan Politik Pasca 1965", dalam *Prisma*, Edisi Khusus 20 Tahun Prisma 1971-1991, hal. 205. Kritisisme Subchan menyebabkannya semakin dekat dengan Jenderal Nasution yang diakhir tahun 1960-an juga sangat kritis terhadap/dan semakin renggang hubungannya dengan Soeharto.

30 Subchan dan politisi NU melakukan berbagai cara untuk menentang Permen itu, dari perdebatan terbuka secara rasional, ancaman *walk-out*, sampai gerakan irrasional seperti tirakat bisu, puasa, sholat hajad dan doa. Sementara Idham Khalid dan kawan-kawan memilih bersikap kompromistis terhadap Permen itu. Lihat *Ibid.*, hal. 213.

pemerintah di daerah-daerah. Subchan dalam kampanyenya berkali-kali memperingatkan bahwa pemungutan suara akan dimanipulasi pemerintah dan menegaskan bahwa NU akan membuka “kantor-kantor pembelaan hukum cuma-cuma” untuk anggota NU yang mengalami intimidasi selama pemilu. Subchan bahkan melontarkan seruan jihad. Seruan ini ditanggapi secara keras oleh Soeharto dengan menuduh NU telah mengobarkan Komando Jihad terhadap pemerintah.³¹ Berkat keberanian Subchan pulalah perolehan suara NU meningkat dari 18,4 % pada pemilu 1955 menjadi 18,7% pada pemilu 1971.

Namun di dalam NU sendiri Subchan menghadapi tantangan berat dari kalangan kiai konservatif dan elit politik yang akomodasionis. Kalangan kiai konservatif keberatan dengan gaya hidup Subchan yang liberal dan kebarat-baratan, sedangkan kalangan politisi akomodasionis mencoba memanfaatkan sikap oposan Subchan untuk mencari keuntungan dari pemerintah. KH. Idham Chalid beberapa kali berhasil mempertahankan kedudukannya sebagai Ketua Tanfidziah NU berkat intervensi-intervensi Ali Murtopo untuk mengganjal usaha Subchan dan pen-

dukungnya untuk merebut kursi Idham. Pada muktamar NU 1967, Subchan gagal menggeser posisi Idham meskipun mendapat tempat di hati banyak kalangan muda NU.

Pada Mukktamar NU tahun 1971, usaha Subchan untuk menjadi Ketua Umum NU lagi-lagi terganjal oleh manuver-manuver Ali Murtopo. Idham yang luwes dan cenderung pro status quo menurut Ali lebih menguntungkan pemerintah untuk menjadi Ketua NU. Namun berkat dukungan dari kalangan generasi muda dan perwakilan daerah, Subchan terpilih sebagai Wakil Ketua I Tanfidziah NU. Namun tak lama kemudian Idham dan Rais Aam yang baru, Kiai Bisri Syansyuri memecat Subchan dari jabatannya di NU dengan alasan gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan tradisi NU.³²

Tokoh NU lain dalam periode ini yang menonjol adalah Kiai Bisri Syansuri. Kiai Bisri terpilih menjadi Rais Aam NU menggantikan Kiai Wahab Chasbullah yang meninggal dunia tahun 1971. Menurut Bruinessen, Kiai Bisri kurang memiliki keluwesan berpolitik dan mendasarkan keputusan-keputusannya pada penalaran fikih. Meskipun lebih suka menghindari konflik dengan pemerintah, Kiai Bisri tidak

31 Untuk menjernihkan tuduhan ini, Jusuf Hasyim bahkan sempat menjelaskan bahwa lencana “Jihad Fisabilillah” yang digunakan Ansor merupakan sisa-sisa kegiatan anti-komunis dan tidak berlaku lagi setelah itu. Lihat Feillard, *Ibid.*, hal. 156-157.

32 Beberapa oknum, seperti Idham Khalid dan Ali Murtopo disebut-sebut telah memberikan foto Subchan yang sedang berdansa mesra dengan beberapa perempuan dan minum-minum. Lihat Bruinessen, *op. cit.*, hal. 94 ; Namun dalam hal ini Subchan mendapatkan pembelaan dari kiai-kiai besar seperti KH As'ad Syamsul Arifin, Kiai Zaini Mun'im, Kiai Bisri Mustofa dan Kiai Ali Ma'sum. Kiai Ali Ma'sum bahkan meminta agar nama Subchan dirchabilitasi karena jika tidak NU “akan kehilangan sebagian generasi mudanya”. Lihat Bruinessen, *op. cit.*, hal. 169.

mau kompromi jika berkaitan dengan prinsip-prinsip fikih. Sikap ini membuat NU berkali-kali dihadapkan pada konfrontasi yang keras dengan pemerintah di tahun 1970-an hingga awal 1980-an.

Hasil pemilu 1971 memperkuat dugaan di kalangan NU bahwa Golkar telah melakukan penyimpangan dan kecurangan dalam pemilu. Intimidasi-intimidasi yang dirasakan kalangan NU selama kampanye pemilu tidak dapat terhapus begitu saja dan menumbuhkan semangat permusuhan terhadap pemerintah. Dari sinilah awal mula NU melakukan politik konfrontasi dan peran oposisi terhadap pemerintah.³³

Konfrontasi pertama terjadi dalam perdebatan tentang rencana Undang-Undang (UU) Perkawinan di DPR tahun 1973. Beberapa pasal dalam undang-undang ini bertentangan dengan hukum keluarga dalam fikih sehingga Kiai Bisri menolaknya, demikian pula dengan semua unsur PPP di DPR. Pada akhirnya, dua pertiga tuntutan NU tentang Undang-Undang Perkawinan dipenuhi DPR.³⁴

Konfrontasi NU dengan pemerintah terjadi lagi pada pemilu 1977. Pada pemilu ini, NU telah meleburkan diri ke dalam PPP bersama partai-partai Islam. Militer dan aparat sipil di semua lapisan berlomba-lomba menekan masyarakat agar memilih Golkar. Dalam hal ini, politisi NU tampil sebagai pengkritik yang paling keras.

Mewakili otoritas Kiai NU, Kiai Bisri mengeluarkan fatwa yang mewajibkan setiap Muslim untuk memilih PPP. Kalangan NU juga mengucilkan kiai-kiai yang ter-Golkar-kan.³⁵

Radikalisme politisi NU mencapai puncaknya dalam SU MPR 1978. Politisi NU menentang rencana pemerintah memberi pengakuan formal terhadap aliran kepercayaan dalam GBHN. Pemerintah juga berencana menyerahkan pengelolaan aliran kepercayaan kepada Departemen Agama. Politisi NU juga memprotes rencana pemerintah melakukan indoktrinasi Pancasila secara massal melalui program P4. Kiai Bisri bersikeras Program P4 dapat mengancam status agama formal, terutama Islam.

Persidangan mengalami kemacetan, dan Fraksi Golkar kemudian mengusulkan dua hal diputuskan melalui pemungutan suara. Cara ini jelas-jelas tidak menguntungkan kelompok Islam sebagai minoritas dalam parlemen. Ketika tiba saatnya pemungutan suara, politisi NU dan PPP pada umumnya secara demonstratif meninggalkan ruang sidang. Tidak tanggung-tanggung, aksi walk-out ini dipimpin langsung oleh Kiai Bisri sebagai Ketua Dewan Syuro PPP. Walk-out juga dilakukan sehari berikutnya ketika diselenggarakan pemungutan suara untuk memutuskan status aliran kepercayaan.³⁶

33Meskipun demikian, kelompok NU konservatif, Idham Chalid tetap mendapat tempat di hati pemerintah, ia diberi jabatan sebagai Ketua DPR dan MPR. Lihat Feillard, *op.cit.*, hal. 158.

34 *Ibid.*, hal. 197.

35 Bruinessen, *op. cit.*, hal. 105.

36 Feillard, *op. cit.*, hal. 202-203.

Menurut Bruinessen, dalam konteks Orde Baru yang sangat menekankan konsensus, aksi *walk-out* ini merupakan bentuk protes yang sangat radikal, yang sama artinya dengan melakukan delegitimasi. Pemerintah bahkan memandang aksi itu sebagai penghinaan terhadap pemerintah dan ideologi Pancasila. Radikalisme itulah yang mendasari Soeharto melakukan depolitisasi terhadap kelompok politisi Islam kritis. Depolitisasi itu dimulai dengan mengganti secara paksa Ketua Umum PPP, Mintaredja, dengan Djaelani Naro, sebuah rekayasa politik yang telah diatur rapi oleh Ali Murtopo.³⁷

Dengan perspektif yang sedikit berbeda, Feillard melihat aksi-aksi *walk-out* itu justru memberikan kemenangan politis bagi NU. Soeharto mengganti Menteri Agama Mukti Ali dengan Alamsjah Ratuperwiranegara. Alamsjah kemudian mengurangi status resmi Aliran Kepercayaan dengan menemukannya di bawah pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Alamsjah juga mengirimkan edaran kepada semua kepala daerah yang meminta agar perkawinan penganut Aliran Kepercayaan dilakukan berdasarkan salah satu dari lima agama resmi. Pada tahun 1980, Alamsjah juga meminta kepada pegawai administrasi di daerah agar meminta para penganut Aliran Kepercayaan untuk menyatakan diri masuk ke agama-agama resmi.³⁸

Kalangan NU juga terus melancarkan protes terhadap penataran P4 yang digalakkan pemerintah. Menurut NU, buku pegangan P4 dapat menegasikan integritas agama Islam dengan dalih toleransi keagamaan. Dalam konteks yang sama, NU juga mengkritik buku-buku pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dihadapkan pada kritisisme ini, beberapa buku pegangan sekolah terpaksa dibakar dan segera diterbitkan buku baru dengan isi yang sudah direvisi.³⁹

Pada tahun 1980, politisi NU sekali lagi melakukan *walk out* dari sidang DPR yang membahas UU baru yang mengatur proses pemilu. Politisi NU memprotes UU ini karena melarang penggunaan gambar Ka'bah sebagai lambang parpol dan melarang kalangan parpol untuk terlibat dalam organisasi penyelenggara pemilu. Pemerintah akhirnya tetap mengizinkan PPP tetap menggunakan lambang Ka'bah, namun melarang kalangan parpol terlibat dalam Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS). Ketika John Naro menyatakan bahwa PPP menerima secara resmi UU itu, politisi NU menegaskan tidak akan hadir pada saat sidang pengesahannya.⁴⁰

Kiai Bisri, sebagai figur sentral yang membuat NU tak kenal kompromi pada awal 1970-an hingga awal 1980-an, meninggal dunia April 1980. Dengan kharismanya yang sangat tinggi dan sifatnya yang tak mengenal kompromi, Kiai Bisri telah

37 Bruinessen, *op. cit.*, hal. 106.

38 Feillard, *op. cit.*, hal. 203-204.

39 *Ibid.*, hal. 205.

40 Bruinessen, *op. cit.*, hal. 107.

mampu mempertahankan posisi NU dari dominasi MI dalam PPP dan tekanan-tekanan pemerintah dalam parlemen. Dalam Munas NU di Yogyakarta 30 Agustus- 2 September 1981, KH. Ali Ma'shum terpilih menjadi Rais Aam menggantikan Kiai Bisri.

Kiai Ali bukanlah figur yang menasional dan dengan tingkat popularitas seperti para pendahulunya. Kiai Ali juga tidak mempunyai banyak pengalaman di bidang politik dan tidak mempunyai ambisi yang besar. Namun banyak diakui bahwa dia adalah figur pembaharu yang terbuka terhadap gagasan-gagasan modernitas dan lebih toleran terhadap dinamika kalangan muda NU. Pembelaan Kiai Ali ketika Subchan dipecat dari kepengurusan NU tahun 1971 adalah salah-satu buktinya. Meskipun tidak seradikal Kiai Bisri, Kiai Ali tetap menjauhi sikap akomodasionis terhadap pemerintah. Kiai Ali mendukung gagasan aktivis pembaharu NU untuk tidak menerima penganugerahan gelar Bapak Pembangunan untuk Soeharto. Di saat semua ormas dan parpol memberikan dukungan terhadap pencalonan Soeharto sebagai presiden tahun 1983, Munas Kaliurang tidak mengeluarkan pendapat

apapun. Kiai Ali juga menolak jabatan Majelis Syuro PPP sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang berlaku.⁴¹

Marginalisasi politis NU terjadi tahun 1981 ketika John Naro mencoret barisan politisi oposan NU dari daftar caleg PPP yang kemudian disetujui pemerintah. Marginalisasi ini memunculkan gagasan di kalangan NU untuk mengundurkan diri dari PPP secara menyeluruh. Namun gagasan ini dicegah oleh Kiai Ali karena dapat mengancam stabilitas sistem politik. Mengundurkan diri dari PPP, menurut Kiai Ali sama dengan menentang pemerintah dan hal ini sangat merugikan NU di masa depan.⁴²

Para ulama lebih memilih untuk memecat Idham dari jabatan tanfidziyah. Idham dianggap tidak memperjuangkan keberadaan politisi NU di PPP ketika marginalisasi terjadi dan justru menjalin hubungan erat dengan John Naro. Idham juga telah dianggap melalaikan otoritas kalangan kiai dan tugas-tugasnya sebagai pemimpin organisasi NU. Tiga kiai besar NU, Kiai As'ad Syamsul Arifin, Kiai Machrus Ali, Kiai Ali Ma'sum, dan politisi NU Masjkur, menemui Idham 2 Mei 1982 dan memaksanya untuk mengundurkan diri.⁴³ Sejak 6

41 Feillard, *op. cit.*, hal. 220-221. Menurut Feillard, sikap radikal NU pada Munas Kaliurang bukan semata-mata karena protes terhadap kebijakan politik Soeharto secara umum atau terhadap PPP, namun juga disebabkan oleh rasa waswas terhadap semakin berkurangnya peran politik NU. Melalui John Naro, pemerintah telah dan terus melakukan marginalisasi terhadap politisi NU di PPP, atau yang dikenal sebagai de-NU-isasi.

42 Feillard, *Ibid.*, hal. 224.

43 Peristiwa 2 Mei menurut Nakamura menjadi preseden buruk dalam sejarah NU. Fakta bahwa ketua umum yang terpilih dalam Muktamar bisa dijatuhkan oleh sekelompok kecil ulama senior menimbulkan spekulasi adanya "elitisme" di tubuh NU. Lihat Mitsuo Nakamura, "Krisis Kepemimpinan NU dan Pencarian Identitas," dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, LKIS, 1997, hal. 79.

Mei 1982, Idham resmi mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU. Namun berkat desakan sayap politik NU dan pemerintah, Idham mencabut pengunduran diri itu 14 Mei 1982. Sejak saat itulah NU terbelah menjadi dua kubu, kubu politisi (Kelompok Cipete) dan kubu ulama-pembaharu (Kelompok Situbondo).

4. Era Pasca Khittah 1926 (1984-1998) : Oposisi “Ekstra-Parlementer” Gus Dur

Munas NU di Situbondo tahun 1983 menghasilkan beberapa keputusan penting yang menunjukkan perubahan fundamental yang akan dilakukan NU. Tiga keputusan penting dalam Munas itu adalah pemulihan Khittah NU 1926, deklarasi hubungan Pancasila dan Islam, serta rekomendasi larangan perangkapan jabatan pengurus NU dengan jabatan pengurus organisasi politik. Keputusan ini menunjukkan kekalahan sayap politisi NU (Kelompok Cipete) dan kembalinya supremasi ulama NU. Keputusan itu juga memperlancar jalan menuju penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi.⁴⁴

Selain Kiai As'ad Syamsul Arifin, ulama NU yang mempunyai peran menonjol dalam Munas Situbondo adalah Kiai Achmad Siddiq. Kiai Achmad mempunyai cakrawala pemikiran yang lebih luas

dibanding kebanyakan kiai yang lain. Seperti yang dirasakan pada aktivis muda NU saat itu, Kiai Achmad juga merasa NU sudah terlalu jauh menyimpang dari semangat asli NU. Untuk mengembalikan NU pada relnya, Kiai Achmad merumuskan prinsip-prinsip yang harus dipertahankan NU dalam sebuah risalah yang telah mendapatkan dukungan dari peserta muktamar di Semarang tahun 1979. Tulisan Kiai Achmad berjudul Pemulihan Khittah NU 1926 menjadi bahan diskusi resmi pada Munas dan banyak dikutip dalam keputusan-keputusan terakhir. Tulisan inilah yang kemudian mendasari langkah NU untuk keluar dari gelanggang politik dan memisahkan diri dari PPP.

Tulisan itu juga memuat pemikiran Kiai Achmad tentang hubungan Islam dan Pancasila, yang pada perkembangannya menjadi sikap resmi NU, seperti berikut⁴⁵:

Pancasila dan Islam dapat berjalan berdampingan dan saling menunjang satu sama lain. Keduanya tidak bertentangan dan tidak akan dipertentangkan. Tidak perlu memilih yang satu dengan mengesampingkan yang lain.

NU menerima Pancasila sebagaimana hasil rancangan konstituante tahun 1945 dan tidak menghendaki perselisihan dalam

44Nakamura, *Ibid.*, hal. 80; Keputusan Munas ini menandai kekalahan kelompok politisi NU yang tergabung dalam Kelompok Cipete atas Kelompok Situbondo yang terdiri dari kalangan kiai senior dan kalangan muda pembaharu. Munas Situbondo menjadi tonggak bagi kemunculan beberapa aktivis muda progresif seperti Abdurrahman Wahid, Fahmi Saifuddin, Mustofa Bisri, Rozy Munir, Said Budairy dan Masdar F. Mas'udi dalam kancah kehidupan NU.

45 Nakamura, *Ibid.*, hal. 82.

menginterpretasikan Pancasila serta menolak pandangan yang mempersamakannya dengan agama.

Islam merupakan tindakan agama sedangkan Pancasila adalah pandangan hidupnya. Pemerintah selalu menekankan, tidak ada maksud untuk menjadikan Pancasila sebagai agama atau memperlakukan Pancasila seolah-olah agama. NU menanggapi pernyataan pemerintah itu, dengan serius dan yakin pemerintah tidak mengajak NU menerima Pancasila dengan cara mereduksi keyakinan Islam. Nu Menerima Pancasila bukan dalam pengertian politik tapi lebih karena pemahaman hukum Islam.

Cara pandang NU terhadap Pancasila ini mendapat pujian dari kaum oposan radikal seperti Syarifuddin Prawiranegara, anggota kelompok oposisi Petisi 50, dan Ketua Korps Muballigh Indonesia (KMI)— sebuah kelompok dakwah yang awalnya menentang asas tunggal. Atas nama KMI, Syarifuddin memuji NU dan para ulamanya telah berhasil mempertahankan asas aqidah Islam sebagai dasar aktivitas organisasi, sambil memasukkan sila-sila Pancasila dalam anggaran dasar, serta tetap mengintegrasikan sila-sila ini sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁶ Keputusan NU untuk menggunakan asas Pancasila namun dengan aqidah dan tujuan Islam pada gilirannya juga diikuti ormas yang lain seperti Muhammadiyah.⁴⁷ Keputusan itu

merupakan usaha mempertahankan identitas keagamaan dalam anggaran dasar organisasi yang memang harus dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan UU Keormasan yang disahkan DPR tahun 1985.

Kiai Achmad juga memikirkan perlunya hubungan yang baik antara NU dan pemerintah. Dalam buku Khittah Nahdliyah (1979) Secara implisit Kiai Achmad berpendapat bahwa radikalisme dan konfrontasi, seperti yang dilakukan NU di tahun 1970-an, terhadap pemerintah bukanlah tradisi NU. Sesuai dengan ajaran Islam, Kiai Achmad menganjurkan sikap moderat atau berada di tengah (*al-tawasuth*), adil (*al-i'tidal*), seimbang (*al-tawazun*) dan *rahmatan li al-'alamin*. Sikap-sikap ini mensyaratkan sifat toleran dan akomodasionis kepada semua pihak kecuali kepada yang benar-benar musuh Islam. Menurut Achmad, Islam tidak membenarkan sikap ekstrem, tatharuf (melihat sesuatu hanya dari satu sisi) dan sikap yang berlebihan.⁴⁸

Muktamar Situbondo 1984, menghasilkan beberapa keputusan penting yang mengubah pola hubungan antara NU dan Pemerintah. NU secara resmi memutuskan untuk berkonsultasi dengan pemerintah, dan menerima Pancasila sebagai asas partai dan memilih kepemimpinan baru dari generasi yang lebih muda, seperti tercermin dari tampilnya duet Achmad Siddiq-

46 Feillard, *op. cit.*, hal. 257.

47 *Ibid.*, hal. 261.

48 Lihat Martin van Bruinessen, "Tradisi Menyongsong Masa Depan: Rekonstruksi Wacana

Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Beberapa pemikiran penting Kiai Achmad dalam Munas 1983 diputuskan sebagai sikap resmi NU.

Keputusan untuk menarik diri dari gelanggang politik, membuat NU kehilangan banyak individunya dalam kancah politik praktis. Sejak Muktamar Situbondo, praktis Gus Dur adalah satu-satunya tokoh NU yang memainkan peran politik yang menonjol, dan ini pun bukan dalam konteks politik praktis. Hal ini paralel dengan keyakinan Gus Dur bahwa sebagai kekuatan Islam untuk berdemokrasi dan toleransi beragama NU hanya bisa dikembangkan di luar struktur formal politik kepartaian Orde Baru.⁴⁹

Sejak mengemban tugas sebagai Ketua PBNU, retorika Abdurrahman Wahid tampak kian bernada liberal dan progresif. Gus Dur secara konsisten menunjukkan sikap yang positif dan fleksibel dalam merespon modernitas. Dalam berbagai kesempatan, Gus Dur berkampanye bahwa watak pluralistik dan multi-komunal masyarakat Indonesia modern haruslah dipertahankan dari kecenderungan-kecenderungan sektarianistik. Pada saat yang sama, Gus Dur juga menunjukkan

sikap oposisi terhadap pemerintahan Soeharto dan mulai melupakan komitmen NU untuk berkonsiliasi dengan pemerintah.

Gus Dur pernah membuat Soeharto marah dengan keterlibatannya dalam protes kalangan NGO kepada Bank Dunia berkaitan dengan proyek Waduk Kedung Ombo. Dalam surat yang gagasan awalnya berasal dari Gus Dur, kalangan NGO menjelaskan pemerintah Indonesia telah banyak merugikan warga setempat dalam proyek yang disponsori Bank Dunia itu. Pemerintah Indonesia benar-benar merasa tertampar oleh protes itu dan mengambil tindakan tegas terhadap NGO-NGO yang terlibat.⁵⁰

Tanggal 1 Maret 1992, NU memperingati ulang tahunnya ke-66 dengan menyelenggarakan rapat akbar di Istora Senayan yang dihadiri 150-200 ribu jama'ah Nahdliyin. Rapat akbar ini secara formal menegaskan kembali kesetiaan NU kepada Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah tidak mempunyai alasan untuk melarang sebuah pertemuan massa yang menyatakan dukungan terhadap pilar-pilar ideologis negara. Namun ada maksud terselubung di balik rapat akbar itu. Dengan menyatakan

Tradisionalis dalam NU” dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *op. cit.*, hal. 151.: Feillard, *op. cit.*, hal. 249-250.

49 Douglas E. Ramage, “Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid”, dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *Ibid.*, hal. 200.

50 Masalah ini pernah digunakan untuk memojokkan Gus Dur pada Muktamar Krapyak 1989. Para penentang Gus Dur menyebarkan pamflet yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan Gus Dur dapat merusak hubungan NU dengan pemerintah. Muktamar ini juga menunjukkan dinginnya hubungan Gus Dur dan Soeharto, Lihat Martin van Bruinessen”, “Perjuangan Meraih Kekuasaan dan Keprihatinan Sosial Catatan Muktamar Krapyak”, dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed.), *op. cit.*, hal. 124.

setia terhadap Pancasila dan UUD 1945, Gus Dur hendak menghindarkan NU dari keharusan untuk mendukung pencalonan Soeharto sebagai presiden. Pada saat itu kebanyakan organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah, telah menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Soeharto. Menurut Gus Dur, NU bukan organisasi politik sehingga tidak perlu memberikan dukungan pencalonan presiden. Menurut Ramage, penolakan NU untuk mendukung presiden Soeharto merupakan cara yang aman dan canggih untuk mendorong perubahan politik.⁵¹

Rapat itu menurut Ramage juga mencerminkan kekhawatiran Gus Dur terhadap kelahiran ICMI yang disponsori pemerintah Desember 1990. Gus Dur berpendapat ICMI melegitimasi eksklusivisme Islam dan mengikis toleransi sosial terhadap kalangan non-Islam di Indonesia. Gus Dur ingin menunjukkan bahwa masih ada dukungan yang besar terhadap kepemimpinan dan cita-citanya tentang Islam yang inklusif dan demokratik. Gus Dur juga ingin menegaskan bahwa NU mendorong proses demokratisasi yang mendasar dan tidak mau dikooptasi oleh pemerintah seperti intelektual Islam yang kehilangan bobot akibat bergabung dalam ICMI.

Gus Dur khawatir ICMI akan digunakan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk melakukan rekonfessionalisasi politik. ICMI akan mengembalikan agama ke dalam panggung politik, dan ingin

menghapuskan jejak usaha dekonfessionalisasi politik yang telah dipelopori NU dalam dua dasawarsa terakhir. Rekonfessionalisasi yang dilakukan ICMI dapat menjadi alasan bagi ABRI untuk sekali lagi mencurigai dan mengawasi kelompok Islam. Kritik Gus Dur terhadap ICMI juga diuraikan dengan apa yang disebut sebagai teori "Kuda Troya". Artinya, sejumlah aktivis Islam yang masuk dalam ICMI menerima Pancasila hanya sebagai taktik untuk masuk ke dalam pemerintahan dan melakukan islamisasi dari dalam. Dukungan ICMI terhadap Soeharto adalah untuk memperoleh balas jasa dengan pengangkatan para pendukung Islamnya untuk menduduki posisi-posisi yang strategis dalam birokrasi.

Untuk merespon pendirian ICMI, Gus Dur dan para aktivis pro-demokrasi mendirikan kelompok kerja bernama Forum Demokrasi (Fordem) Maret 1991, di mana Gus Dur sebagai ketua. Fordem adalah sebuah sarana untuk mendorong proses integrasi nasional melalui eliminasi terhadap kelompok-kelompok yang berorientasi-sektarian. Menurut Gus Dur, Fordem ingin memerangi intoleransi keagamaan dan kesukuan dan mencegah merebaknya manipulasi isu-isu agama untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan kelompok. Pada aras yang sama, Gus Dur melihat ICMI sebagai contoh ekstrem eksploitasi politik terhadap agama di mana kepentingan kelompok "eksklusif" yang sempit diletakkan di atas

51 Pembahasan tentang oposisi Gus Dur terhadap pemerintahan Soeharto di bawah ini, lihat Ramage, *op. cit.*, hal. 194-219.

kepentingan nasional.

Seperti dijelaskan oleh Ramage, Gus Dur memandang hubungan antara Islam Indonesia yang toleran dan negara demokratis tidak dapat dipisahkan. Gus Dur berpendapat jika Islam Indonesia sepenuhnya mendukung sistem politik sekular yang memperlakukan semua orang Indonesia secara adil berdasarkan “kesamaan kewarganegaraan”, maka Islam Indonesia akhirnya akan menunjukkan pada dunia bahwa modernitas, politik yang terbuka dan demokrasi bisa berkembang dengan baik dalam sebuah masyarakat mayoritas Islam.

Fordem dengan berbagai pemikirannya mendapatkan reaksi keras dari kalangan pemerintah. Tak lama setelah Fordem lahir, Menko Polkan Sudomo menegaskan bahwa Indonesia sudah menjadi sebuah negara yang berdemokrasi (Pancasila) sehingga tidak memerlukan lagi forum seperti Fordem. Kapuspen ABRI Brigjen Nurhadi menyatakan bahwa Fordem bertentangan dengan konsep massa mengambang dan dapat menciptakan kelompok-kelompok politik yang sempit. Letjen Harsudiono Hartas secara terbuka juga menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan Fordem bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, serta seringkali membingungkan masyarakat.

Di sisi lain, Gus Dur juga pernah melontarkan kritik pribadi yang sangat pedas terhadap Soeharto. Dalam buku *Nation in Waiting* (1994) karya Adam Schward, Gus Dur menyatakan ada dua hal yang menyebabkan Soeharto mengabaikan peringatannya tentang bahaya ICMI. Pertama, karena kebodohan. Kedua, karena Soeharto tidak mungkin membiar-

kan seseorang menjadi kuat dan berada di luar kontrolnya. Gus Dur juga mengatakan bahwa Presiden Soeharto telah meminta Menteri Keuangan untuk menghambat perkembangan bank-bank NU-Summa. Kritik ini menurut Ramage sangat fenomenal. Sebab posisi Soeharto saat itu sangat kuat sehingga hampir tidak ada satu pihak pun yang berani secara konfrontatif melawannya.

Perlawanan Gus Dur terhadap Soeharto juga tercermin dari pembelaannya terhadap Megawati yang beberapa kali merasakan represi yang telanjang dari pemerintahan Soeharto. Gus Dur adalah pihak yang paling bersimpati ketika Megawati disingkirkan dari pucuk pimpinan PDI melalui Munas Medan 1996. Menjelang pemilu 1997, Soeharto bahkan mengkhawatirkan kecenderungan Gus Dur untuk mengarahkan terjadinya koalisi antara NU dan PDI. Upaya Golkar untuk memenangkan pemilu 1997 dapat terancam jika pemilih NU yang diperkirakan 35 juta beralih ke PDI.

Isu kedekatan Gus Dur dengan Megawati digunakan kelompok anti Gus Dur yang didukung pemerintah untuk menajutahkan kredibilitas Gus Dur pada Mukhtamar 1994. Namun Gus Dur dapat meraih suara terbanyak dalam pemilihan ketua tanfidziyah mengalahkan kuda-hitam didukung pemerintah, Abu Hasan. Terpilihnya Gus Dur dalam Mukhtamar Cipasung menunjukkan kembali independensi NU dibandingkan dengan ormas atau orpol yang lain.

Citra Gus Dur sebagai simbol oposisi terhadap pemerintahan Soeharto luntur pada saat-saat akhir pemerintahan Soe-

harto. Dalam sebuah acara di Jawa Timur, Gus Dur berpelukan mesra dengan Soeharto dan peristiwa ini dimaknai berbagai pihak sebagai rujuk antara kedua belah pihak. Apalagi setelah itu, Gus Dur juga beberapa kali mengajak anak sulung Soeharto yang juga ketua Golkar, Tutut Indra Rukmana bersafari ke pesantren-pesantren dan menghadiri acara-acara besar NU. Hal ini menimbulkan tandanya besar tentang hubungan Gus Dur dengan Megawati.

5. Era Pasca Soeharto (1998-2000): NU Kembali ke Politik Praktis

Tanggal 23 Juli 1998, lima ulama terkemuka NU, KH. Ilyas Ruhiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Munasir Ali, KH. Muchith Muzadi dan KH. Mustofa Bisri mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ini merupakan langkah besar yang diambil elit Nahdliyin di era pasca Soeharto. Pendirian PKB sekaligus menandai perubahan besar dalam peranan dan perilaku politik NU setelah menarik diri dari gelanggang politik dengan deklarasi kembali ke Khittah 1926 tahun 1984.⁵²

Dalam berbagai kesempatan Gus Dur dan elit NU lainnya menegaskan bahwa PKB adalah satu-satunya partai yang

dilegitimasi PBNU. Hal ini menimbulkan sikap pro dan kontra yang semarak di kalangan NU. Beberapa pihak dalam NU juga mempersoalkan proyeksi PKB sebagai partai yang terbuka dan sekular dan tidak menggunakan Islam sebagai asas partai. Tak pelak, berdirilah parpol yang sama-sama berbasis masa NU. KH. Yusuf Hasyim mendirikan Partai Kebangkitan Umat (PKU), KH. Syukron Makmun mendirikan Partai Nahdhatul Ummah (PNU) dan Abu Hasan mendirikan Partai SUNI.

Yusuf Hasyim secara terang-terangan menyatakan bahwa pendirian PNU adalah wujud kekecewaan terhadap PKB. Yusuf menegaskan legitimasi tunggal yang diberikan kepada PKB menunjukkan bahwa Gus Dur tidak mau mendengarkan aspirasi warga NU secara menyeluruh. Yusuf juga mempersoalkan kedekatan Gus Dur dengan kalangan elit politik sekuler. "Jika yang sekuler menjadi pemerintah Indonesia bisa jadi seperti Turki. Di Turki negara secara tegas melarang pelaksanaan pengajaran dan pendidikan agama di sekolah", ujar Yusuf.⁵³

Yusuf Hasyim menyebut kebijakan politik PBNU berkaitan dengan keberadaan PKB sebagai politik belah bambu. "Yang satu diinjak yang satu diangkat. Yang

52 Pendirian PKB, sebagaimana dikatakan Prof. Dr. Said Aqiel Siradj, diilhami realitas bahwa selama Orde Baru pemerintahan telah sedemikian jauh meminggirkan peranan politik NU. Selama itu pula warga NU tidak mempunyai saluran politik tersendiri sehingga suaranya tersebar di berbagai kekuatan politik. Karena NU telah kembali ke Khittah 1926 semenjak tahun 1984, maka aspirasi NU perlu disalurkan ke satu-satunya partai milik NU, PKB. Kelahiran PKB juga didasari kesadaran bahwa menjadi kewajiban bagi NU untuk beramar ma'ruf nahi munkar guna mengubah pemerintahan yang korup, penuh kolusi, nepotisme dan monopolitis warisan Orde Baru. Lihat Prof. Dr. KH. Said Aqiel Siradj, MA, *Islam Kebangsaan, Fiqih Demokratik Kaum Santri*, Pustaka Ciganjur, 1999, hal. 159-161.

53 *Detik.com*, 11 Agustus 1999.

diangkat menjadi manja dan merasa benar terus (benar sendirian), sementara yang diinjak merasa dipinggirkan dan berusaha mencari eksistensinya,” tegas Yusuf.⁵⁴ Yusuf meminta elit NU kembali ke Khittah 1926, dengan bersikap adil, netral dan memberikan kebebasan kepada warganya dalam memilih partai yang dikehendaki.⁵⁵

Dalam pemilu 1999, PKB menduduki rangking ke empat dengan meraih 12 % dari total suara. Pemandangan yang menarik kemudian adalah bagaimana sikap politisi PKB menjelang pemilihan presiden pada SU MPR 1999. Pada awalnya, PKB mendukung keputusan PDIP untuk mencalonkan Megawati sebagai presiden; sebuah dukungan yang diputuskan lewat Musyawarah Pimpinan PKB.

Persoalan timbul ketika poros tengah yang digalang Amien Rais mencalonkan Gus Dur sebagai presiden. Pada awalnya, PKB berusaha tetap konsisten dengan dukungannya terhadap Megawati, meskipun poros tengah mencalonkan Gus Dur sebagai Presiden dan Gus Dur meneri-

manya. Ketua Umum PKB, Matori Abdul Jalil menegaskan partainya akan mendukung Mega sampai final karena sebelumnya secara pribadi Gus Dur juga mendukung Megawati. “Dukungan pribadi itu telah dikembangkan PKB sebagai dukungan institusi. Dan kalau hari ini Gus Dur menganggap sudah tidak mendukung Mega lagi, secara institusi dukungan itu sudah terjadi. PKB akan mendukung Mega sampai final,” tandas Matori.⁵⁶

Namun ketika dukungan terhadap Gus Dur semakin mengental, sikap PKB mulai goyah dan beberapa elitnya berpaling kepada Gus Dur.⁵⁷ Dalam hal ini, Sekjen PKB Muhaimin Iskandar mengakui bahwa posisi PKB sangat dilematis. Di satu sisi, peringkat 4 yang dicapai dalam pemilu membuat PKB memilih bersikap realistik dengan memberikan dukungan kepada calon presiden dari partai pemenang pemilu. Namun di sisi lain PKB juga mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. “Akhirnya, PKB pun tunduk pada market politik yang meng-

54 Menurut Yusuf, politik belah bambu ini telah mengakibatkan terjadinya benturan sekaligus bentrokan antar sesama warga Nahdliyin. Bentrok yang keras terjadi antara massa PPP dan massa PKB (keduanya NU) di Jepara Jawa Tengah yang mengakibatkan enam warga tewas beberapa minggu sebelum pemilu 1999; Lihat “Politik Belah Bambu di Lapisan Elite NU”, *Kompas*, 8 Mei 1999.

55 Di lain pihak, Syukron Makmun menolak anggapan bahwa pendirian PNU untuk menandingi PKB. Syukron menegaskan bahwa PNU lahir justru untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak dimasuki oleh partai manapun termasuk PKB. “Kami ini akan berjalan politik bersih. Jadi ya tidak akan main sodok dengan yang lain,” tegas Syukron. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa PNU juga mensiratkan resistensi sayap politik NU yang aspirasinya tidak tertampung dalam PKB. Lihat *Detik.com*, 13 September 1998.

56 Pernyataan ini disampaikan setelah Gus Dur menyatakan tetap bersedia dicalonkan menjadi presiden oleh poros tengah dan tidak lagi mendukung Megawati sebagai presiden; Lihat “Ketua Umum PKB Matori Abdul Djilil : PKB Tetap Dukung Mega”, *Detik.com*, 24 Agustus 1999.

57 Dukungan resmi PKB itu disampaikan kepada wartawan dalam sebuah jumpa pers di Ruang F-

inginkan Gus Dur jadi presiden. Bagi PKB, tidak ada kata mendua, ambivalensi, tapi market politik harus dilalui.....Market politik adalah yang paling baik,” tegas Muhaimin.⁵⁸

Realitas di atas bagaimanapun menggambarkan karakter politisi PKB yang sesungguhnya. Mereka tidak mengingkari fakta historis bahwa Gus Dur adalah figur sentral di balik kelahiran PKB. Seakan-akan meneguhkan watak paternalistik NU, mereka pun tidak berani mengambil keputusan politik yang berseberangan dengan keinginan-keinginan Gus Dur. Seperti dikatakan Matori, PKB mendukung pencalonan Megawati karena pada awalnya secara pribadi Gus Dur juga mendukung Megawati. Dan pada akhirnya ketika Gus Dur menyatakan bersedia dicalonkan menjadi presiden oleh Poros-Tengah, mayoritas politisi NU mendukung pencalonan ini.⁵⁹

Gus Dur akhirnya terpilih menjadi presiden menggantikan BJ Habibie. Dalam perkembangan selanjutnya, gerak-langkah PKB semakin “setali tiga uang” dengan keinginan Gus Dur. Paralelisme antara sikap politik PKB dengan dinamika perilaku politik Gus Dur semakin tak terbantahkan. Sayap politisi NU dalam

PKB semakin meneguhkan perannya sebagai pendukung setia gagasan dan sikap Gus Dur dalam arti yang positif maupun negatif.

Menurut Laode Ida, posisi yang dipilih PKB ini sebenarnya suatu hal yang lazim dalam politik. PKB telah menjadi kelompok kepentingan yang sangat fanatik terhadap kelompok dan figur pemimpin yang tampil dari kalangannya sendiri. Dukungan yang diterima Gus Dur memang niscaya akan diperoleh setiap pemimpin yang tampil dari suatu organisasi berbasis massa kuat dan berwatak patronase seperti halnya NU ini. Dengan kata lain, dukungan itu merupakan perwujudan dari sikap solidaritas mekanis massa tradisional.⁶⁰

Di sisi lain, sebuah rejim bagaimanapun membutuhkan peran “*the ruling party*” yang mau memberikan dukungan yang solid dan kontinyu atas kebijakan-kebijakannya. Gus Dur membutuhkan PKB sebagaimana Soekarno membutuhkan dukungan PNI di era Orde Lama, dan sebagaimana Soeharto membutuhkan Golkar di era Orde Baru.

Meskipun di kalangan NU sendiri terjadi pro-kontra tentang gagasan Gus Dur untuk mencabut Tap MPRS No 25

PKB (Ruang Komisi III), Gedung MPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta & September 2000. Dalam jumpa pers itu, hadir Ketua PKB Alwi Shihab dan Khofifah Indar Parawansa, Ketua F-PKB MPR Yusuf Muhammad, dan Sekjen PKB Muhaimin Iskandar, serta Ali Masykur Musa; Lihat “PKB Resmi Dukung Gus Dur Capres”, *Detik.com*, 7 September 1999.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Tidak semua politisi mendukung pencalonan Gus Dur. Matori sampai pada detik terakhir masih konsisten dengan dukungannya terhadap Megawati, dan atas sikapnya ini Matori mendapatkan penilaian yang negatif dari kalangan NU.

⁶⁰ Laode Ida, “NU Era Reformasi dan Pasca Gus Dur: Problem Khittah dan Nasib Gerakan Sosial”, dalam *Tashwirul Afkar*, edisi No. 6, 1999, hal. 14.

tahun 1966 tentang PKI, secara resmi PKB mendukung gagasan ini. Ketua PBNU, KH. Hasyim Muzadi menegaskan bahwa penjelasan Gus Dur tentang Tap XXV/MPRS/1966 membuktikan bahwa Gus Dur adalah milik bangsa. "Gus Dur dalam hal ini kapasitasnya sebagai presiden dan dia merasa presidennya siapa saja termasuk pemilihnya yang dulunya PKI" tegas Hasyim.⁶¹ Senada dengan Hasyim, Said Aqiel Siradj menyatakan rencana pencabutan Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tidak kan memungkinkan PKI bangkit kembali. Menurut Said, Gus Dur hanya memberi peluang untuk menengok kembali Tap MPRS yang dulu disusun atas dasar emosional dan alasan yang kurang signifikan.⁶²

Politisi PKB tampak terjebak dalam kecenderungan utopianisme terhadap Gus Dur. Kecenderungan ini terwujud dalam sikap selalu membenarkan apa saja yang dikatakan dan dilakukan Gus Dur.⁶³ Hal ini berkaitan dengan realitas bahwa sikap dan pernyataan kontroversial Gus Dur sangat kontraproduktif terhadap legitimasinya sebagai presiden. Sikap dan pernyataan itu menimbulkan kegaduhan

politik dan elit politik terstimuli untuk melontarkan berbagai tuduhan dan prasangka yang menyudutkan Gus Dur. Kalangan elit politik tidak mau tinggal diam melihat Gus Dur, dalam kedudukan sebagai pemimpin formal, masih saja mempertahankan kebiasaan-kebiasaan tradisional yang tidak sesuai dengan semangat reformasi hukum dan ketatanegaraan.

Pada titik inilah energi politisi PKB tercurah untuk menyusun argumentasi dan retorika guna membela Gus Dur dari berbagai kritik dan tuduhan. Politisi PKB tidak melihat bahwa pernyataan-pernyataan kontroversial Gus Dur tidak kondusif untuk pemulihan kondisi politik dan ekonomi. Mereka juga tidak secara kritis mempermasalahkan kebijakan-kebijakan Gus Dur yang tidak populer, seperti saat menggantikan Menteri BUMN Laksamana Sukardi dan Menperindag Jusuf Kalla dengan alasan yang lemah dan dengan pengganti yang kurang qualified.

Sebagai pendukung setia Gus Dur, Matori mengatakan bahwa penggantian kedua menteri itu merupakan hak prerogatif presiden sehingga tidak perlu

61 "Hasyim Muzadi Soal Pencabutan Tap PKI : 'Itu Bukti Gus Dur Milik Bangsa' ", *Detik.com*, 21 Mei 2000.

62 "Said Aqiel Siradj : Tak Ada Risiko Cabut Tap PKI", *Detik.com*, 6 April 2000.

63 Dengan nada mengeluh dan sedikit berseloroh, Sekjen PKB Muhaimin Iskandar pernah mengatakan "Meskipun langit biru pun, kalau Gus Dur bilang kuning, ya saya akan bilang kuning." Muhaimin menyatakan selorohnya itu ketika bertemu dengan Menlu Alwi Shihab yang sedang berbincang-bincang dengan wartawan di Istana Merdeka. "Wah ada apa nih malam-malam ke sini," tanya Alwi sambil tertawa.

"Ya apa lagi Pak, kerjaan saya kan belain Gus Dur," cetus Muhaimin sambil tertawa juga. Lihat "PKB Bingung Belain Gus Dur", *detik.com*, 29 April 2000.

dipersoalkan. Retorika ini diulang-ulang Matori dalam berbagai diskusi tentang kinerja pemerintahan Gus Dur, sehingga melahirkan repetisi yang cukup menjemukan.

Pembelaan politisi PKB terhadap Gus Dur juga sangat terasa dalam kasus bulog. Politisi PKB bersikeras mengatakan Gus Dur sama sekali tak terlibat dalam kasus bulog.⁶⁴ Meski goyangan terhadap Gus Dur semakin kencang berkaitan dengan kasus ini, Muhaimin Iskandar tetap optimis posisi Gus Dur tak akan tergoyahkan. Bahkan secara irasional Muhaimin menyatakan, "Saya yakin Gus Dur sakti. Maka apa pun yang dipelintir, tidak akan mampu melawan Gus Dur. Saya perlu katakan, di balik semua ini adalah Orba yang ingin memelintir semua masalah dan ditumpahkan pada Gus Dur."⁶⁵

Dihadapkan pada eskalasi kritisisme terhadap Gus Dur, politisi PKB acapkali kebingungan dalam melakukan pembelaan.⁶⁶ Retorika-retorika yang mereka lontarkan sering terasa klise dan bombastis, sementara lawan politik Gus Dur hadir dengan retorika-retorika yang tajam dan

meyakinkan.

Elit PKB masih sering terjebak pada simbol-simbol supernatural dan mitos-mitos kewalian seorang kiai. Mereka sering mengatakan bahwa Gus Dur adalah individu dengan kualitas setingkat "wali". Gus Dur diberkahi dengan ilmu ladunni, mempunyai kemampuan istimewa yang membedakannya dengan manusia kebanyakan. Gus Dur seakan-akan dianggap tidak dapat berbuat salah, dan orang-orang yang mengkritik Gus Dur-lah sebenarnya yang salah karena mereka tidak dapat memahami jalan pikiran Gus Dur. Dalam konteks inilah elit PKB sering memohon permakluman sikap-sikap Gus Dur yang kontroversial dan nyleneh. Sikap-sikap itu menurut mereka tetap dalam koridor membela kepentingan bangsa, melayani kemaslahatan umat sehingga elit politik tidak perlu mempersoalkannya. Politisi PKB juga terjebak pada kelatahan dengan mencurigai kritisisme yang muncul sebagai konspirasi politik untuk menjatuhkan Gus Dur.⁶⁷

Dengan kata lain, meskipun Gus Dur telah menjadi pemimpin formal, elit PKB

64 "Muhaimin Yakin Gus Dur Tak Terlibat Buloggate", *detik.com*, 9 Juni 2000.

65 "Muhaimin: Meski Ada Buloggate, Gus Dur Takkan Jatuh", *detik.com*, 3 Juni 2000.

66 Kebingungan ini diakui sendiri oleh orang-orang PKB. Langkah Gus Dur yang sukar ditebak dan banyak menimbulkan protes, menyebabkan mereka kebingungan dalam membela Gus Dur. Lihat "PKB Bingung Belain Gus Dur", *Detik.com*, 29 April 2000.

67 Muhaimin Iskandar, dalam hal ini, sempat melontarkan sinyalemen tentang adanya kelompok yang ingin menjatuhkan Gus Dur. "PKB sendiri pada prinsipnya membiarkan saja ada yang mengkritik Gus Dur. Tetapi bila targetnya bulan Agustus Gus Dur jatuh, itu di luar konstitusi dan kita akan akan melawan mereka," Wujud ekstrem dari utopianisme politisi PKB terlihat ketika mereka mengancam akan mengerahkan kekuatan massa untuk menghadapi pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Gus Dur dalam SU MPR Agustus 2000. Lihat "Muhaimin Iskandar: Lawan, Komplotan yang Jatuhkan Gus Dur", *Detik.com*, 9 Mei 2000: Sinyalemen semacam ini juga dilontarkan oleh elit PKB maupun elit NU yang lain.

masih menempatkannya layaknya seorang pemimpin tradisional, di mana dimensi “ketaatan” santri kepada kiai sangat menonjol. Demi cita-cita PKB sendiri untuk menjadi partai yang modern dan terbuka, alangkah baiknya jika pembelaan-pembelaan yang normatif dan irrasional itu mulai ditinggalkan. Pembelaan-pembelaan itu terasa kurang populer dalam iklim politik yang telah sedemikian rupa berubah, dan bisa jadi akan menjadi sasaran kritisisme kekuatan politik yang lain.

Namun tidak semua politisi NU terjerat dalam utopianisme terhadap Gus Dur. Sikap kritis masih ditunjukkan oleh figur semacam KH. Yusuf Hasyim dan Hamzah Haz. Yusuf menentang gagasan Gus Dur untuk menghapus Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang PKI. Sementara itu Hamzah Haz dengan keras menegaskan perlunya political action terhadap Gus Dur. “...karena kita tidak bisa mengikuti gaya (kepemimpinan-pen) Gus Dur terus-menerus, sebab hanya membuat masalah berputar-putar saja,” ujar tokoh PPP yang tersingkir dari kabinet Gus Dur ini. Lebih lanjut Hamzah juga mensinyalir adanya usaha-usaha untuk mem-PKB-kan kabinet.⁶⁸

Muktamar PKB ke I di Surabaya 23-28 Juli 2000 meneguhkan pengaruh dan otoritas Gus Dur yang tak terbantahkan dalam partai ini. Gus Dur secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro PKB tanpa ada kritik yang signifikan. Gus Dur

juga mengakhiri debat tentang calon ketua umum PKB dengan mengajukan nama Matori Abdul Jalil, yang segera diamini oleh seluruh muktamirin. Gus Dur bahkan mempunyai “hak prerogratif” untuk menentukan siapa yang duduk dalam kepengurusan partai dan siapa yang harus disingkirkan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa ketergantungan PKB terhadap Gus Dur akan semakin kuat. Gus Dur telah memastikan kepengurusan DPP PKB dipegang oleh orang-orang yang loyal terhadapnya. Sebaliknya, figur-figur semacam Matori Abdul Jalil, sebagai wujud balas budi terhadap Gus Dur, niscaya akan menyediakan diri sebagai benteng pelindung dari gerakan-gerakan oposisi terhadap Gus Dur. Gus Dur sendiri tampaknya juga masih akan bertahan dengan perilaku kontroversialnya sehingga selalu tersedia alasan bagi kalangan elit politik untuk menjalankan fungsi kritik yang semarak.

6. Catatan Penutup

Cukup riskan untuk menyimpulkan bahwa politisi NU identik dengan karakter atau corak berpolitik yang tunggal, establish dan tanpa dinamika. Sejarah politik NU diwarnai oleh tarik-menarik yang semarak dan kontinyu antara corak berpolitik akomodasionis-kompromis vs radikal, afirmatif vs kritis (terhadap state), serta konservatif vs liberal. Tarik menarik ini terjadi di sepanjang sejarah keterlibatan NU

68 “Hamzah Haz: Gaya Gus Dur Tak Bisa Diikuti Terus”, *detik.com*, 1 Mei 2000.

dalam gelanggang politik nasional dan membentuk suatu dinamik yang sangat menarik untuk dicermati.

Keterlibatan NU dalam kehidupan politik nasional diawali dengan problem kelangkaan SDM berkualitas. NU tidak dapat memanfaatkan kontribusinya yang besar di era revolusi fisik karena tidak mempunyai kader yang cukup dan mumpuni untuk menduduki berbagai jabatan strategis dalam pemerintahan baru tahun 1949. Kendala itu pula yang membuat peran politik NU kurang greget sepanjang dekade 1950-an dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kaum Islam modernis. Konsentrasi Politisi NU cenderung terpusat untuk menyelamatkan patronase politiknya di pemerintahan. NU juga cenderung mengembangkan watak paternalistik dan corak berpolitik yang akomodasionis-kompromistis terhadap pemerintah.

Kecenderungan itu berlanjut dan kian mengental di Era Demokrasi Terpimpin. KH. Wahab Chasbullah dan Idham Chalid menjadi pembela Soekarno yang sangat konsisten. Dengan justifikasi fikihnya, Kiai Wahab menyatakan kesediaan NU untuk berpartisipasi dalam Demokrasi Terpimpin dengan menafikan reaksi keras kaum Islam modernis. Sedangkan Idham Chalid mendukung manifesto politik Soekarno, Manipol Usdek. Meskipun demikian, ada beberapa elit NU yang kritis terhadap Soekarno seperti Imron Rosjadi dan KH. M. Dahlan yang melibatkan diri dalam Liga Demokrasi.

Tarik-ulur antara corak akomodasionis-radikal sangat semarak perjalanan NU di era Orde Baru. Subchan ZE yang liberal-modernis mempelopori gerakan oposisi NU yang keras terhadap pemerintah di awal Orde Baru. Pada dekade 1970-an NU juga menjadi kekuatan yang paling radikal dan oposan terhadap negara. Mitsuo Nakamura menggunakan istilah "Tradisionalisme Radikal" untuk menjelaskan sikap politik NU di tahun 1970-an. Artinya, NU menjadi radikal secara politik justru karena secara agama dia bercorak tradisional.⁶⁹ Anggota parlemen dari NU melakukan konfrontasi langsung terhadap pemerintah melalui serangkaian aksi walk out dari sidang parlemen. Menurut Bruinessen, gerakan walk-out politisi NU dari sidang parlemen yang membahas UU Pemilu tahun 1980 adalah konfrontasi yang paling fenomenal dalam sejarah politik Indonesia Orde Baru.

Konfrontasi-konfrontasi NU terhadap pemerintah selama dekade 1970-an membuahkan berbagai tekanan yang keras dari pemerintah. Kenyataan ini mendorong elit NU melakukan reorientasi politik di awal dekade 1980-an. Terjadilah perubahan mendasar dalam corak berpolitik NU yang dimotori KH Ahmad Sidiq dan Abdurrahman Wahid. Kedua tokoh ini mempelopori keputusan NU untuk kembali ke Khittah 1926 dan memisahkan diri dari PPP tahun 1984. NU kemudian secara mengejutkan juga menerima Pancasila azas tunggal. Sebuah keputusan yang menjadi bahan olok-olok di kalangan Islam mo-

⁶⁹ Nakamura, *op. cit.*, hal 59-61

dernis, meskipun pada perkembangannya keputusan itu juga diikuti ormas-ormas lain, termasuk Muhammadiyah.

Dinamika politik NU pasca Khittah didominasi gerakan oposisi "eskrta parlementer" Gus Dur. Meskipun telah memelopori rekonsiliasi NU dengan pemerintah di awal 1980-an, pada perkembangannya Gus Dur menjadi pengkritik kebijakan Soeharto yang paling keras. Gus Dur mengkritik keras pendirian ICMI dan menjadi salah satu penggerak Forum Demokrasi (Fordem). Gus Dur juga menjadi pendukung Megawati ketika yang bersangkutan mendapatkan berbagai tekanan dari rejim Soeharto. Namun Gus Dur kurang dapat mempertahankan konsistensi sikapnya di akhir era rejim Soeharto, dengan menjalin hubungan dekat dengan unsur-unsur Orde Baru.

Peran politik NU pasca Soeharto ditandai dengan kelahiran PKB dan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden. Sebagai satu-satunya partai yang mendapat legitimasi PBNU, PKB ternyata tak dapat melepaskan diri dari pengaruh dan otoritas Gus Dur. Di satu sisi, politisi PKB adalah pendukung utama gagasan Gus Dur tentang pluralitas, keterbukaan dan inklusivisme partai politik, depolitisasi agama dan dekonfessionalisasi politik. PKB berusaha mengembangkan watak inklusif dengan merekrut orang-orang non-NU, bahkan non-Islam dalam kepengurusan partai. PKB juga berusaha mencairkan kebekuan hubungan massa Islam dan massa nasionalis dengan menjalin "kedekatan" dengan PDIP pra dan pasca pemilu 1999.

Namun di sisi lain PKB menjadi

kelompok kepentingan yang sangat fanatis terhadap figur pemimpin yang berasal dari kalangan sendiri. PKB cenderung senantiasa membenarkan apa saja yang dilakukan dan diucapkan Gus Dur, sehingga sulit untuk membayangkannya dapat bersikap kritis terhadap sang patron.

Kecenderungan itu dapat menjadi hambatan utama bagi PKB untuk membangun citra parpol yang mandiri, demokratis dan modern. Watak paternalistik yang melekat pada kecenderungan itu sangat tidak populer dalam iklim politik yang telah sedemikian rupa mengedepankan nilai-nilai rasionalitas, fairness dan profesionalisme. Dengan tetap mempertahankan watak paternalistik, akan sulit bagi PKB untuk menarik simpati dari kalangan modernis non-NU. PKB akan tetap dilihat sebagai representasi dari sayap politik NU dengan corak tradisionalisme Islamnya.

Fanatisme PKB terhadap Gus Dur juga meneguhkan citra PKB sebagai partai pemerintah. Posisi PKB akan dianalogikan dengan posisi Golkar di era Orde Baru. Persoalannya kemudian adalah masyarakat masih sangat trauma dengan hubungan patron-clien antara Soeharto dan Golkar. Pola hubungan ini telah menghancurkan sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan politik nasional dan menindas kekuatan politik alternatif yang berusaha menjalankan peran oposisi yang efektif terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, citra sebagai partai pemerintah tentu saja bukan daya tarik bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya pada sebuah parpol.

Pada hal di sisi lain, politisi NU di era PKB sebenarnya telah menunjukkan

berbagai kemajuan yang berarti. Mereka mulai dapat mengedepankan perhitungan-perhitungan politik yang rasional dan tidak lagi hanya berorientasi pada kaidah-kaidah fikih dalam menentukan sikap-sikap politik. Mereka juga mampu membuat kalkulasi-kalkulasi politik yang dibutuhkan untuk eksistensi sebuah parpol dalam konstelasi

politik yang tercipta. Yang tak kalah penting, politisi NU sebenarnya juga cukup diakui sebagai pendukung ide-ide keterbukaan, pluralisme dan inklusivisme politik, meskipun dukungan ini sulit dilepaskan dari interdependensinya terhadap Gus Dur yang juga gandrung terhadap ide-ide itu.

❖ (Agus Sudibyo)